

PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK



ADMINISTRASI PUBLIK

- ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM MENJADI DISIPLIN ILMU (ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON)
- ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI DISIPLIN ILMU



Pengantar Ilmu Administrasi Publik



ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON

- **PIMIKIRAN CONFUCIUS (Plato, Aristoteles, Marchiavelli, Montesquieu, Rousseu, Bonnin, Hegel, Vivien, Mil) sudah mengenal administrasi publik dimana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik (Pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah)**



ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON

- Vivien (Etudes administratives) → ada dikotomi antara administrasi dan politik, Fungsi eksekutif dibagi dua yaitu fungsi politik (membuat kebijakan / aturan) dan administrasi (yang menjalankan aturan/kebijakan)
- Hegel (the Philosophy Of Rights) → Administrasi sebagai pelayan publik fungsi sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani

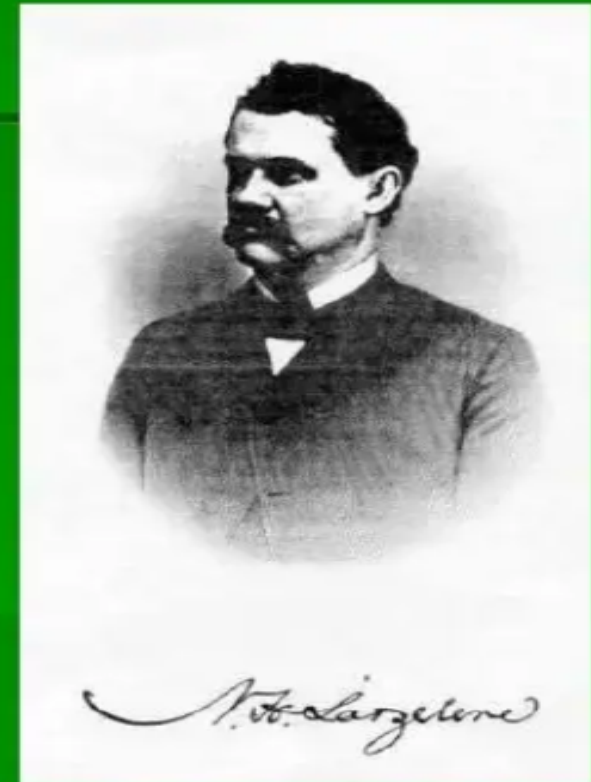


KESIMPULAN :

- BAHWA BERDASARKAN TULISAN KUNO (JAUH SEBELUM WILSON) ADMINISTRASI PUBLIK SUDAH GENCAR DIPERSOALKAN

ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI DISIPLIN ILMU

- Pada perkembangan Administrasi sebagai disiplin Ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang.
- Menurut Nicholas Henry (publicAdministration and public affairs) menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma
- Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiewski Bahwa standart disiplin ilmu mencakup Locus dan Focus



ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI DISIPLIN ILMU

- *Locus* adalah letak/kelembagaan dari administrasi berada,
- sedangkan *focus* adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi.

Robert T. Golimbiewski menyatakan paradigma AN akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah Locus dan Focus tersebut.

Paradigma I : Dikotomi Politik-Administrasi (1900- 1926)



Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya *Politics and Administration* menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda:

- 1) fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara,
- 2) fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara.

Penekanan pada Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow Locusnya berpusat pada (government Bureucracy) birokrasi Pemerintahan.

Sedangkan Focusnya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas dalam Administrasi Publik kurang dibahas secara jelas

- Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya *Introduction To the study of Public Administration* oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai.

Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Diawali dengan terbitnya *Principles of Public Administration* karya W F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi,

- Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi **Focus** kajian Administrasi Publik

sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, dimana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

- Pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen Kalsik sangat besar Tokoh-tokohnya adalah :
- F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu ; perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuyk memperoleh kinerja terbaik ; perlu dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawab dengan kerjanya ; perlua ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan → (prinsip management ilmiah Taylor)
- Kemudian disempurnakan oleh Fayol (POCCCC) dan Gullick dan Urwick (Posdcorb)

Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut :

NO	G.R.Terry	Jhon F Mee	Louis A.Allen	MC.Namura
1	Planning	Planning	Leading	Planning
2	Organizing	Organizing	Planning	Programming
3	Actuating	Planning	Organizing	Evaluating
4	Controlling	Organizing	Controlling	System
NO	Henry Fayol	Harold Koontz & Cyrll O'Donnell	DR. S.P.Siagian	Prof. Drs. Oey Ling Lee
1	Planning	Planning	Planning	Perencanaan
2	Organizing	Organizing	Organizing	Pengorganisasian
3	Commanding	Staffing	Planning	Pengarahan
4	Coordinating	Directing	Organizing	Pengkoordinasian
5	Controlling	Controlling	Evaluating	Pengontrolan
NO	W.H. Newman	Luther Gullick	Lyndall F. Urwick	Jhon D. Millet
1	Planning	Planning	Forecasting	Directing
2	Organizing	Organizing	Planning	Facilitating
3	Assembling Resources	Staffing	Organizing	
4	Directing	Directing	Commanding	
5	Controlling	Coordinating	Coordination	
6		Reporting	Controlling	
7		Budgeting		

Paradigma III

Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

- Menurut HERBERT SIMON (The Poverb Administration) → Prinsip Manajemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari “public Administration “ menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik
- Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark (element Of Public Administration) yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin

Lanjutan

- Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari Administrasi negara.

Paradigma IV: Administrasi Negara Sebagai Administrasi (1956-1970)

- Istilah *Administrative Science* digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada focus tetapi tidak pada locusnya,
- ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, pengembangan paradigma ke-4 ini bukannya tanpa hambatan, banyak persoalan yang harus dijawab seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang public (negara) dalam administrasi tersebut dan banyak persoalan lainnya.

Paradigma V: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

- Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin AN:
 - 1) Ahli AN meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni
 - 2) satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijaksanaan publik.

- Lebih dari itu administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (Policy Science) dan cara pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanaan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy dan teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (*Public Affairs*).

- Selain Pendapat Henry diatas banyak tokoh yang punya sudut pandang berbeda dalam mebjelaskan perkembangan Ilmu Administrasi Publik
- Gerald E. Caiden membagi Administrasi Publik dalam beberapa aliran :
 - Aliran Proses → POSDCORB sebagai proses Administrasi publik
 - Aliran Empiris → Kasus dan studi parktek
 - Aliran perilaku → Komunikasi, motivasi, Kepemimpinan, interaksi, Konflik
 - Alliran analisis birokrasi _ peraturan / aturan yang rasional (weber)
 - Aliran Sistem sosial→ sistem organisasi
 - Aliran Pengambilan keputusan
 - Aliran matematik
 - Aliran pendekatan holistik

- Barzelay dan Armajani → Mengemukakan bahwa administrasi publik mengalami pergeseran dari paradigma birokratik ke paradigma Post Birokratik

Paradigma Birokratik :

1. Menekankan kepentingan publik, efisiensi, administrasim dan kontrol
2. Mengutamakan fungsi, otoritas, dan struktur
3. Ketaatan aturan dan prosedur
4. Beroperasinya sistem-sistem

Paradigma Post Birokratik :

1. Menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai produksi, keterikatan pada norma
2. Mengutamakan pemberian penilaian masyarakat, akuntabilitas dan hubungan kerja
3. Penerapan pemahaman, identifikasi masalah
4. Pengukuran hasil, memperluas pilihan pelanggan

- D. Osborn dan T Gaebler dan dioperasionalkan Osborn dan Plastrik → Pemerintahan yang katalistik , memberdayakan, semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan hasil bukan cara, mengutamakan pelanggan, wirausaha, antisipatif, dandentralistik, dan berorientasi pasar
- Era New Public Administration (J. V. Denhard) dalam “ New Public service → Melayani warga masyarakat bukan pelanggan; Mengutamakan kepentingan Publik ; Lebih menghargai warga negara bukan kewirausahaan, Berfikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari akuntabilitas bukan suatu yang mudah, melayani dari pada mengendalikan, menghargai orang buka produktivitas semata

Ciri Administrasi Negara

1. Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (Unavoidable), titik tekannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan masyarakat dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary(sewaktu-waktu)

2. Administrasi Negara mempunyai Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya

- Negara Mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan Kepatuhan terhadap Hukum, Kekuasaan untuk melaksanakan Paksaan dipahami sebagai (coercive power),
- administrasi negara merupakan penjelamaan dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, Kehakiman, dll

3. Administrasi Negara Mempunyai Prioritas

- Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya.

4.Administrasi Negara mempunyai Ukuran yang tidak terbatas

- Diamana terdapat lingkupan masyarakat dalam negar yang meliputi batasan teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi negara.

5. Top mangement dari Administrasi Negara bersifat Politis.

- Birokrasi merupakan suatu organisasi publik yang dipimpin oleh pejabat Pilihan publik dan bersifat Non karier, mereka dipilih berdasarkan periode waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan perbedaan yang sangat mendasar dari organisasi publik dan Privat.

6. Pelaksanaan Administrasi negara relatif sulit diukur

- administrasi negara merupakan institusi publik yang bertujuan melayani masyarakat maka tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami yaitu untuk mencapai perdamaian dan peningkatan kualitas kehidupan pada semua tatanan negara,
- karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan tersebut juga bersifat politis dan multitafsir maka AN menjadi relatif sulit untuk diukur .